



Menakar Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi: Analisis Pro-Poor Growth 2023–2024

Angger Halim Ismail^{1*}, Zulgani², Cadra Mustika³, Siti Hodijah⁴, Nurhayani⁵

^{1,2,3,4,5} Universitas Jambi

*Corresponding author, email; anggerhalimismail@gmail.com, gzulgani@gmail.com, candra.mustika@yahoo.com, sitihodijah@unja.ac.id, nurhayani@unja.ac.id

ARTICLE INFO

Article history:

Received Agustus 2025

Revised September 2025

Accepted December 2025

Available online

<http://journal.uaindonesia.ac.id/index.php/JSE>

Keywords:

real poverty, economic growth, income redistribution, Shapley decomposition, pro-poor growth, Jambi Province

Turabian style in citing this article: [citation Heading] Angger Halim Ismail, Zulgani, Cadra Mustika, Siti Hodijah, Nurhayani” Menakar Inklusivitas Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Jambi: Analisis Pro-Poor Growth 2023–2024” *Journal of Sharia Economics* 7, No. 2 Dec: 2025

ABSTRACT

This study aims to analyze changes in real poverty in Jambi Province between 2023 and 2024 using the Datt–Ravallion (1992) decomposition approach and Shapley decomposition through the DASP analysis package. The analysis was conducted separately for urban and rural areas to capture spatial differences in poverty dynamics. The data used came from the National Socioeconomic Survey (SUSENAS) with adjustments for inflation and the real poverty line, thereby reflecting actual changes in welfare rather than nominal changes. The results of the study show that the real poverty rate in urban areas of Jambi decreased from 10.19 percent in 2023 to 8.16 percent in 2024, while in rural areas it fell from 6.28 percent to 4.88 percent in the same period. However, Shapley decomposition shows that in both areas, the decline in poverty was due more to the effects of redistribution than to the effects of growth. In urban areas, the growth component (0.0031) actually slightly increased real poverty, while redistribution (–0.0234) contributed significantly to its decline. In rural areas, growth had only a small impact (0.0005), while redistribution (–0.0145) was the main factor in the decline in poverty. This shows that economic growth in Jambi Province is not yet fully inclusive (non-pro-poor growth), as the benefits of growth are still concentrated among the middle and upper classes, while improving income distribution is the key to reducing poverty. This study confirms that the effectiveness of poverty alleviation is determined not only by the rate of economic growth, but also by the quality and distribution of its results. The decomposition-based approach allows for more precise identification of the sources of poverty change and provides an empirical basis for the formulation of more inclusive and contextual development policies at the regional level.

1. Pendahuluan

Kemiskinan tetap menjadi isu fundamental dalam pembangunan ekonomi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia. Meski pertumbuhan ekonomi relatif stabil dalam dua dekade terakhir, distribusi manfaatnya belum merata. Ketimpangan pendapatan yang tinggi menghambat penurunan kemiskinan, karena kelompok miskin belum sepenuhnya menikmati hasil pertumbuhan (Bourguignon, 2003; Ravallion &

Datt, 1992). Oleh karena itu, analisis hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kemiskinan menjadi penting untuk menilai sejauh mana pertumbuhan bersifat *pro-poor*, yakni mampu menurunkan kemiskinan melalui pemerataan hasil pembangunan (Kakwani & Pernia, 2000).

Secara teoretis, perubahan kemiskinan antar waktu ditentukan oleh dua komponen utama: *growth effect* dan *redistribution effect* (Datt & Ravallion, 1992). Efek pertumbuhan menggambarkan kontribusi peningkatan pendapatan rata-rata terhadap pengurangan kemiskinan, sedangkan efek redistribusi mencerminkan perubahan akibat pergeseran ketimpangan pendapatan. Tanpa mekanisme redistribusi yang efektif, pertumbuhan ekonomi dapat memperlambat penurunan kemiskinan atau bahkan memperdalam ketimpangan (Kakwani, 2000; Duclos & Araar, 2006). Dengan demikian, kemiskinan bukan hanya fenomena ekonomi, melainkan juga cerminan dari struktur sosial dan distribusi kesempatan ekonomi yang timpang.

Dalam konteks Indonesia, meskipun pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai lebih dari 5 persen per tahun, penurunan kemiskinan tidak selalu sejalan dengan laju pertumbuhan. Penelitian menunjukkan bahwa elastisitas kemiskinan terhadap pertumbuhan semakin menurun, sementara ketimpangan menjadi faktor penghambat utama penurunan kemiskinan (Sumarto, 2013; Nugraha & Widyasthika, 2017). Pasca pandemi COVID-19, pemulihan ekonomi belum sepenuhnya inklusif, karena pertumbuhan cenderung terkonsentrasi di sektor dan wilayah tertentu. Pola yang sama terlihat di Provinsi Jambi, di mana penurunan kemiskinan berjalan lambat dan tidak merata antara wilayah perkotaan dan perdesaan.

Data Badan Pusat Statistik (BPS, 2024) menunjukkan bahwa tingkat kemiskinan di Jambi menurun dari 7,58 persen pada Maret 2023 menjadi 7,10 persen pada Maret 2024. Jumlah penduduk miskin berkurang dari 280,68 ribu menjadi 265,42 ribu orang. Penurunan ini terjadi di wilayah perkotaan (dari 10,19% menjadi 9,50%) dan perdesaan (dari 6,28% menjadi 5,90%). Namun, angka tersebut masih lebih tinggi dibandingkan provinsi tetangga seperti Riau (6,67%) dan Sumatera Barat (5,97%). Pada saat yang sama, ekonomi Jambi tumbuh 4,51 persen dengan PDRB sebesar Rp322,98 triliun dan PDRB per kapita Rp86,7 juta (BPS, 2025). Struktur ekonomi masih didominasi sektor pertanian, kehutanan, dan perikanan (33,93%), diikuti pertambangan (13,41%) dan perdagangan (13,29%). Dominasi sektor primer yang berproduktivitas rendah mengindikasikan pertumbuhan ekonomi yang belum inklusif dan kurang berdampak terhadap penurunan kemiskinan.

Temuan ini sejalan dengan bukti internasional bahwa pertumbuhan ekonomi tidak otomatis bersifat *pro-poor*. Studi di Tiongkok (Luo, 2022; Fan & Zou, 2023) dan Kenya (Mwabu, 2023) menunjukkan bahwa pertumbuhan baru efektif menurunkan kemiskinan jika disertai redistribusi pendapatan yang adil. Tanpa itu, pertumbuhan justru memperlebar kesenjangan sosial. Laporan IMF (2023) di Afrika Sub-Sahara juga menegaskan bahwa pengurangan kemiskinan ekstrem hanya terjadi bila pertumbuhan ekonomi diiringi tata kelola fiskal yang berpihak pada pemerataan. Dengan demikian, arah dan kualitas pertumbuhan lebih menentukan kesejahteraan dibanding tingkat pertumbuhan semata.

Dengan kerangka teoritis tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perubahan kemiskinan di Provinsi Jambi antara 2023 dan 2024 melalui pendekatan dekomposisi Datt–Ravallion (1992) dan Shapley decomposition menggunakan

Distributive Analysis Stata Package (DASP). Analisis dilakukan secara terpisah untuk wilayah perkotaan dan perdesaan berdasarkan data mikro SUSENAS, sehingga perbedaan spasial dalam dinamika kemiskinan dapat diidentifikasi secara empiris.

Secara akademik, penelitian ini memperluas literatur empiris tentang dinamika kemiskinan daerah melalui kombinasi dua pendekatan dekomposisi yang saling melengkapi. Sebagian besar studi sebelumnya berfokus pada level nasional (Nugraha & Widyasthika, 2017; Syam, 2022; Luo, 2022), sementara penelitian ini menekankan heterogenitas provinsi dengan struktur ekonomi dualistik seperti Jambi. Dengan demikian, penelitian ini memperkuat validitas empiris konsep *pro-poor growth* serta menunjukkan relevansi metodologis penggunaan DASP dalam konteks lokal Indonesia.

Dari sisi kebijakan, hasil penelitian ini menjadi dasar bagi perumusan strategi penanggulangan kemiskinan berbasis bukti (*evidence-based policy*). Jika efek pertumbuhan lebih dominan, kebijakan sebaiknya diarahkan pada peningkatan produktivitas sektor padat karya dan ekspansi kesempatan kerja. Namun, bila efek redistribusi lebih kuat, maka fokus perlu dialihkan pada kebijakan pemerataan—melalui penguatan perlindungan sosial, akses pendidikan dan kesehatan, serta reformasi struktural di pasar tenaga kerja dan upah.

Selain itu, temuan mengenai perbedaan antara wilayah perkotaan dan perdesaan dapat menjadi pijakan bagi kebijakan *spatially targeted*, di mana intervensi pembangunan disesuaikan dengan karakteristik wilayah. Dengan demikian, penelitian ini tidak hanya memperkaya wacana akademik tentang kemiskinan dan pertumbuhan, tetapi juga memberikan rekomendasi kebijakan praktis untuk memperkuat pembangunan inklusif di Provinsi Jambi dan Indonesia secara umum.

2. Tinjauan Pustaka

Analisis kemiskinan dan ketimpangan ekonomi telah menjadi topik sentral dalam kajian pembangunan ekonomi sejak dekade 1980-an. Salah satu pendekatan paling berpengaruh dalam memahami perubahan kemiskinan antar waktu adalah dekomposisi pertumbuhan dan redistribusi, yang diperkenalkan oleh Datt dan Ravallion (1992). Pendekatan ini memisahkan perubahan kemiskinan menjadi dua komponen utama: perubahan akibat pertumbuhan pendapatan rata-rata (*growth component*) dan perubahan akibat distribusi pendapatan (*redistribution component*). Secara teoritis, pendekatan ini berakar pada fungsi sosial kesejahteraan yang dinyatakan sebagai fungsi monoton terhadap pendapatan individu. Dalam konteks ini, kemiskinan dapat berkurang jika terjadi peningkatan pendapatan rata-rata atau penurunan ketimpangan distribusi, atau kombinasi keduanya (Ravallion & Datt, 1992). Salah satu dasar matematis utama yang digunakan dalam analisis ini adalah indeks Foster–Greer–Thorbecke (FGT), yang dikembangkan oleh Foster et al. (1984) dan kemudian dikaji ulang setelah dua dekade penerapannya (Foster, Greer, & Thorbecke, 2010). Indeks ini memiliki sifat dekomposabilitas yang memungkinkan analisis kemiskinan dilakukan lintas wilayah dan antar waktu, serta digunakan sebagai indikator dasar dalam berbagai studi empiris (Duclos & Araar, 2006). Pendekatan dekomposisi berbasis FGT kemudian dikembangkan melalui Shapley value decomposition, yang menyempurnakan metode Datt–Ravallion dengan menyeimbangkan kontribusi pertumbuhan dan redistribusi sehingga hasilnya bebas

dari residu (Araar & Duclos, 2007). Pendekatan ini kini banyak digunakan karena mampu memberikan estimasi yang lebih stabil dan simetris terhadap perubahan kemiskinan.

Dalam konteks empiris, hubungan antara pertumbuhan ekonomi, ketimpangan, dan kemiskinan sering disebut sebagai segitiga kemiskinan-pertumbuhan-ketimpangan (*poverty-growth-inequality triangle*) sebagaimana dijelaskan oleh Bourguignon (2003). Berbagai penelitian di negara berkembang menunjukkan bahwa meskipun pertumbuhan ekonomi berperan dalam menurunkan kemiskinan, efek redistribusi seringkali menentukan apakah pertumbuhan tersebut bersifat *pro-poor* atau tidak. Studi Sumarto (2013) di Indonesia menemukan bahwa antara 2002–2012, pertumbuhan ekonomi berhasil menurunkan kemiskinan sekitar 17,5 poin persentase, tetapi redistribusi negatif menahan hampir separuh efek positif tersebut. Hasil serupa ditunjukkan oleh Nugraha dan Widyasthika (2017), yang mendapati bahwa pada periode 2012–2016 pertumbuhan di Indonesia hanya bersifat inklusif pada awal periode, sementara pada periode berikutnya efek redistribusi negatif meningkat, menandakan menurunnya inklusivitas pertumbuhan.

Sejalan dengan itu, penelitian berbasis data mikro di tingkat daerah, seperti oleh Syam (2022) di Sulawesi Selatan, menunjukkan bahwa efek pertumbuhan memiliki dampak lebih besar di wilayah perdesaan, sedangkan redistribusi menjadi faktor penentu di wilayah perkotaan. Temuan ini menegaskan pentingnya pendekatan wilayah dalam analisis kemiskinan, karena dinamika pertumbuhan dan ketimpangan tidak homogen antar ruang. Pendekatan spasial ini juga didukung oleh analisis empiris global, misalnya oleh Luo (2022) di Tiongkok yang menemukan bahwa pertumbuhan pendapatan di wilayah pedesaan 2007–2018 berkontribusi kuat terhadap penurunan kemiskinan absolut, tetapi peningkatan ketimpangan menghambat penurunan kemiskinan relatif. Fan dan Zou (2023) memperkuat temuan tersebut dengan menunjukkan bahwa redistribusi yang tidak inklusif pada periode 2012–2018 justru meningkatkan kemiskinan relatif di Tiongkok.

Kajian di Afrika juga memberikan bukti serupa. Mwabu (2023) menekankan bahwa di Kenya, strategi "*growth with redistribution*" lebih efektif dibandingkan pertumbuhan semata dalam menurunkan kemiskinan, sementara studi Nkoro et al. (2025) menunjukkan bahwa di kawasan Sub-Sahara Afrika, pertumbuhan baru akan efektif mengurangi kemiskinan ekstrem jika disertai tata kelola dan distribusi yang baik. Secara konseptual, temuan-temuan tersebut konsisten dengan teori *pro-poor growth*, di mana manfaat pertumbuhan harus lebih besar bagi kelompok miskin dibanding kelompok kaya agar kemiskinan menurun secara signifikan (Kakwani & Pernia, 2000; Son et al., 2003).

Dengan demikian, literatur empiris dan teoretis secara konsisten menunjukkan bahwa pertumbuhan ekonomi tanpa perbaikan distribusi tidak cukup untuk mengurangi kemiskinan secara berkelanjutan. Pendekatan dekomposisi seperti Datt–Ravallion dan Shapley memberikan kerangka analisis yang kuat untuk memisahkan efek keduanya dan mengukur sejauh mana penurunan kemiskinan bersifat *pro-poor* atau *anti-poor*. Dalam konteks Provinsi Jambi, penerapan kedua pendekatan ini pada data mikro SUSENAS tahun 2023–2024 memungkinkan analisis mendalam mengenai perubahan kesejahteraan antar waktu, sekaligus memberikan landasan empiris bagi perumusan kebijakan pengentasan kemiskinan berbasis bukti.

3. Metodologi Penelitian

3.1. Data dan Cakupan Penelitian

Penelitian ini menggunakan data mikro *Survei Sosial Ekonomi Nasional (SUSENAS)* tahun 2023 dan 2024 yang diterbitkan oleh *Badan Pusat Statistik (BPS)*. Unit analisis adalah rumah tangga di Provinsi Jambi dengan dua klasifikasi wilayah: perkotaan dan perdesaan, sebagaimana ditetapkan dalam variabel *status tempat tinggal (r105)*. Untuk menjaga konsistensi harga antar tahun, seluruh data pengeluaran rumah tangga tahun 2024 dikonversi menjadi pengeluaran per kapita riil menggunakan *Indeks Harga Konsumen (IHK)* per provinsi. Demikian pula, garis kemiskinan tahun 2024 di-inflate agar berada pada harga konstan tahun 2023. Pendekatan ini memastikan bahwa perubahan kemiskinan yang diukur mencerminkan variasi riil daya beli, bukan akibat inflasi nominal.

Unit pengamatan terbatas pada rumah tangga biasa, dengan pembobot survei (*weight variable weind*) digunakan untuk memperoleh estimasi yang mewakili populasi provinsi. Analisis dilakukan terpisah antara wilayah perkotaan dan perdesaan untuk menangkap heterogenitas struktural dalam dinamika kemiskinan.

3.2. Pengukuran Kemiskinan

Ukuran kemiskinan dihitung menggunakan *Foster–Greer–Thorbecke (FGT)* index dengan parameter $\alpha = 0$, yang merepresentasikan *headcount ratio* atau proporsi penduduk miskin. Indeks ini dihitung dari distribusi pengeluaran per kapita terhadap garis kemiskinan provinsi. Secara matematis, FGT ditulis sebagai:

$$P_{\alpha} = \frac{1}{N} \sum_{i=1}^q \left(\frac{z - y_i}{z} \right)^{\alpha}$$

di mana N adalah jumlah total penduduk, q jumlah penduduk miskin, y_i pengeluaran individu ke- i , dan z garis kemiskinan. Untuk $\alpha = 0$, indeks menggambarkan proporsi penduduk di bawah garis kemiskinan (*headcount*).

3.3. Pendekatan Dekomposisi Shapley

Untuk menganalisis determinan perubahan kemiskinan, penelitian ini menerapkan pendekatan *Datt–Ravallion (1992)* dan *Shapley decomposition*. Kedua metode ini memungkinkan pemisahan perubahan kemiskinan antar dua periode menjadi tiga komponen:

1. Efek pertumbuhan (*growth effect*) – perubahan akibat peningkatan rata-rata pengeluaran rumah tangga;
2. Efek redistribusi (*redistribution effect*) – perubahan akibat perubahan ketimpangan distribusi pengeluaran;
3. Residue (*residual*) – sisa perubahan yang tidak dapat dijelaskan secara sempurna oleh dua efek utama.

Pendekatan *Datt–Ravallion* menilai perubahan kemiskinan dengan dua kemungkinan periode referensi (tahun t_1 dan t_2) untuk memastikan robustnes, sedangkan pendekatan *Shapley* menggunakan prinsip kontribusi marjinal rata-rata dari seluruh permutasi pertumbuhan dan redistribusi, yang menghasilkan dekomposisi yang

simetris dan bebas residu.

Formulasi Datt–Ravallion ditulis sebagai:

$$\Delta P = G + R + \varepsilon$$

dengan *G* mewakili *growth component*, *R* *redistribution component*, dan ε *residual*. Penghitungan dilakukan menggunakan paket DASP (Distributive Analysis Stata Package) dalam perangkat lunak *Stata 17*, yang dikembangkan oleh Araar dan Duclos (2007). Analisis menghasilkan estimasi *standard error* (STE) serta interval kepercayaan (LB–UB) melalui prosedur *bootstrap* untuk memastikan signifikansi statistik.

3.4. Strategi Analisis dan Interpretasi

Hasil dekomposisi dibandingkan antara tahun 2023 dan 2024 untuk menilai apakah perubahan kemiskinan di Provinsi Jambi didorong oleh pertumbuhan atau redistribusi. Interpretasi dilakukan berdasarkan tanda dan besarnya: nilai positif pada komponen *growth* menunjukkan bahwa pertumbuhan meningkatkan kemiskinan (non-pro-poor), sementara nilai negatif menunjukkan pertumbuhan pro-miskin. Sebaliknya, nilai negatif pada *redistribution* menandakan bahwa pemerataan distribusi berkontribusi menurunkan kemiskinan.

Analisis dilanjutkan dengan perbandingan antara wilayah perkotaan dan perdesaan untuk menilai kontras pola ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Perbandingan hasil empiris kemudian dikontekstualisasikan dengan literatur nasional dan internasional mengenai hubungan antara pertumbuhan, ketimpangan, dan kemiskinan.

4.1. Hasil

Gambaran umum dna hasil penelitian ini terbagi kedalam 2 wilayah, yaitu wilayah perkotaan dan perdesaan. Hal ini sesuai dengan rilis data kemiskinan yang selalu membagi berdasarkan wilayah tersebut, begitu juga ketika perhitungan menggunakan dua batas garis kemiskinan berbeda berdasarkan wilayah.

4.1.1 Wilayah Perkotaan

Berdasarkan hasil estimasi, tingkat kemiskinan riil di wilayah perkotaan Provinsi Jambi menurun dari 10,19% (2023) menjadi 8,16% (2024). Penurunan sebesar 2,03 poin persentase ini menunjukkan perbaikan daya beli dan kesejahteraan rumah tangga perkotaan, setelah memperhitungkan pengaruh inflasi antar waktu. Karena garis kemiskinan dan pengeluaran per kapita tahun 2024 sudah dikonversi ke harga konstan, maka angka ini menggambarkan penurunan kemiskinan riil, bukan sekadar nominal.

Tabel 1. Dekomposisi Variasi Indeks FGT ($\alpha = 0$) Menjadi Pertumbuhan dan Redistribusi Wilayah Perkotaan, Provinsi Jambi 2023–2024

Komponen / Pendekatan	Perkotaan			
Parameter α	00.00			
Garis Kemiskinan (Rp)(2023)	699.123			
Komponen	Estimate	STE	LB	UB
Distribution_1 (2023)	0,101895	0,011609	0,082797	0,120993

Distribution_2 (2024)	0,081555	0,010205	0,064766	0,098343
Difference (d2 - d1)	-0,02034	0,015457	-0,05064	0,009955
Shapley Approach				
<i>Growth</i>	0,003065	0,011297	-0,01908	0,025206
<i>Redistribution</i>	-0,023405	0,019598	-0,06182	0,015006

a. Efek Pertumbuhan (*Growth Effect*)

Nilai growth effect sebesar 0,0031 memiliki tanda positif, yang berarti bahwa pertumbuhan rata-rata pengeluaran justru sedikit meningkatkan kemiskinan riil.

Interpretasi ini konsisten dengan situasi di mana pertumbuhan ekonomi di wilayah perkotaan tidak inklusif atau non-pro-poor growth, yaitu pertumbuhan lebih banyak dinikmati oleh kelompok menengah dan atas.

Secara statistik, efek ini tidak signifikan karena interval kepercayaan (-0,019 hingga +0,025) melintasi nol. Namun, arah positifnya mengindikasikan bahwa peningkatan rata-rata pengeluaran belum banyak membantu rumah tangga di bawah garis kemiskinan untuk keluar dari kondisi miskin. Dengan demikian, pertumbuhan ekonomi di perkotaan Provinsi Jambi tahun 2023–2024 dapat dikategorikan sebagai pertumbuhan yang belum pro-poor.

b. Efek Redistribusi (*Redistribution Effect*)

Nilai redistribution effect sebesar -0,0234 menjadi komponen dominan penurunan kemiskinan. Artinya, perubahan dalam distribusi pengeluaran rumah tangga — bukan pertumbuhan total pengeluaran — menjadi faktor utama penurunan kemiskinan di wilayah perkotaan. Meskipun standar error relatif besar (0,0196), nilai efek redistribusi lebih besar dibanding efek pertumbuhan, yang menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan lebih dipengaruhi oleh pemerataan dibanding ekspansi ekonomi.

4.1.2 Wilayah Perdesaan

Berdasarkan hasil estimasi, tingkat kemiskinan di wilayah perdesaan Provinsi Jambi mengalami penurunan antara tahun 2023 dan 2024. Nilai indeks FGT(0) (headcount ratio) menurun dari 0,06279 (6,28%) pada 2023 menjadi 0,04875 (4,88%) pada 2024, atau berkurang sekitar 1,4 poin persentase. Artinya, proporsi penduduk miskin di perdesaan menurun sekitar 22% secara relatif dalam satu tahun setelah penyesuaian inflasi.

Tabel 2. Dekomposisi Variasi Indeks FGT ($\alpha = 0$) Menjadi Pertumbuhan dan Redistribusi Wilayah Perdesaan, Provinsi Jambi 2023–2024

Komponen / Pendekatan	Perdesaan			
Parameter α	00,00,00			
Garis Kemiskinan (Rp)(2024)	552.720			
Komponen	Estimate	STE	LB	UB
Distribution_1 (2023)	0,06279	0,005891	0,053099	0,07248
Distribution_2 (2024)	0,048746	0,004712	0,040995	0,056498
Difference (d2 - d1)	-0,014043	0,007543	-0,02883	0,000742
Shapley Approach				
<i>Growth</i>	0,000494	0,004361	-0,00805	0,00904

distribusinya mulai tidak inklusif meski pertumbuhan tetap berlangsung. Maka, hasil analisis wilayah perkotaan dan perdesaan kami mengonfirmasi dinamika yang sejalan yaitu: pertumbuhan saja tidak cukup jika tidak disertai redistribusi yang lebih pro-miskin.

Kedua, adanya perbedaan antara perkotaan dan perdesaan menunjukkan bahwa mekanisme pengurangan kemiskinan bersifat kontekstual. Di wilayah perdesaan, misalnya, efek redistribusi negatif lebih kecil ($\approx -0,0145$) dibandingkan perkotaan ($\approx -0,0234$), sementara efek pertumbuhan juga lebih rendah namun masih positif. Ini menunjukkan bahwa di perdesaan, bahkan pertumbuhan kecil pun dapat berdampak jika distribusi cukup stabil, tetapi di perkotaan meskipun pertumbuhan relatif lebih kuat, distribusi yang kurang kondusif dapat menahan penurunan kemiskinan. Penelitian di Sulawesi Selatan oleh Andy Rezky Pratama Syam (2022) misalnya menunjukkan bahwa efek pertumbuhan dalam dekomposisi Shapley memang lebih berdampak di perdesaan daripada di perkotaan antara 2016-2018, dan redistribusi memiliki peran kritis untuk mengubah arah perubahan kemiskinan. Dengan demikian, hasil kami menegaskan pentingnya memperlakukan wilayah perkotaan dan perdesaan secara berbeda dalam kebijakan pengentasan kemiskinan: di perkotaan perhatian harus ekstra pada distribusi, sementara di perdesaan fokus dapat sedikit lebih pada memperkuat pertumbuhan namun tetap menjaga inklusivitas.

Ketiga, dari sisi metodologis, penggunaan pendekatan dekomposisi seperti Martin Ravallion & Geeta Datt (Datt–Ravallion) maupun pendekatan Shapley telah memberikan pemahaman rinci mengenai kontribusi pertumbuhan dan distribusi. Sebagaimana dibahas dalam literatur metodologi bahwa dekomposisi FGT memungkinkan pemisahan perubahan kemiskinan menjadi komponen perubahan rata-rata pendapatan dan perubahan distribusi (Ravallion, 1991).

Hasil penelitian di Provinsi Jambi ini juga sejalan dengan persepektif global dimana pertumbuhan ekonomi (“growth”) memberikan kontribusi positif namun kecil terhadap penurunan kemiskinan, sementara perubahan distribusi pendapatan (“redistribution”) justru negatif dan menghambat — sangat konsisten dengan pola yang ditemukan di Tiongkok. Sebagai contoh, dalam penelitian oleh Chuliang Luo (2022) tentang pedesaan Tiongkok 2007–2018, ditemukan bahwa pertumbuhan ekonomi memiliki efek sangat signifikan dalam pengurangan kemiskinan absolut, namun efek ketidaksetaraan (*inequality effect*) seringkali menggeser sebagian besar manfaat pertumbuhan sehingga penurunan kemiskinan relatif lebih lambat atau bahkan stagnan. Untuk studi lainnya, Zengzeng Fan & Wei Zou (2023) menemukan bahwa di Tiongkok komponen redistribusi pada periode 2012-2018 justru *meningkatkan* kemiskinan relatif (-6,60 % dalam satu periode) meskipun komponen pertumbuhan menurunkannya. Dengan demikian, hasil penelitian ini menunjukkan bahwa redistribusi negatif (yakni menahan penurunan kemiskinan) terjadi di perkotaan (-0,0234) maupun perdesaan (-0,0145) ternyata sesuai dengan bukti internasional bahwa pertumbuhan saja tidak cukup bila distribusi pendapatan tidak membaik.

Secara keseluruhan, pembahasan ini menunjukkan bahwa untuk mempercepat penurunan kemiskinan dalam wilayah perkotaan dan perdesaan, kebijakan tidak boleh hanya berfokus pada mempercepat pertumbuhan ekonomi saja—melainkan secara simultan harus menguatkan mekanisme distribusi yang memastikan bahwa kelompok miskin memperoleh bagian yang signifikan dari pertumbuhan tersebut.

Kebijakan redistributif—baik melalui transfer sosial, penguatan akses modal dan pendidikan untuk kelompok miskin, serta peningkatan konektivitas antar wilayah—menjadi sangat penting, apalagi di wilayah perkotaan. Sementara itu, di wilayah perdesaan, memperkuat inklusivitas pertumbuhan dengan menjaga agar disparitas tidak melebar dapat menjadi strategi yang lebih efektif. Pengalaman Indonesia dan negara-lain menunjukkan bahwa tanpa kondisi distribusi yang mendukung, bahkan pertumbuhan yang tinggi dapat terjebak dalam pola “trickle-down” yang kurang pro-miskin (Sumarto, 2013). Oleh karena itu, disarankan bahwa program pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi dan sekitarnya hendaknya mengintegrasikan variabel distribusi sebagai indikator utama monitoring, selain variabel pertumbuhan.

5. Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penurunan kemiskinan di Provinsi Jambi selama periode 2023–2024 lebih banyak didorong oleh faktor redistribusi pendapatan dibandingkan dengan pertumbuhan ekonomi. Meskipun terjadi peningkatan kesejahteraan secara agregat, pertumbuhan ekonomi yang berlangsung belum bersifat inklusif, karena manfaatnya belum sepenuhnya dirasakan oleh kelompok masyarakat berpendapatan rendah. Hal ini menunjukkan bahwa penurunan kemiskinan di Jambi lebih mencerminkan perbaikan distribusi pendapatan ketimbang perluasan kesempatan ekonomi yang merata.

Dengan demikian, pengentasan kemiskinan di Provinsi Jambi tidak cukup mengandalkan akselerasi pertumbuhan ekonomi semata, tetapi harus disertai dengan kebijakan yang memperkuat aspek pemerataan, seperti perluasan akses terhadap lapangan kerja produktif, peningkatan kualitas sumber daya manusia, serta kebijakan fiskal dan sosial yang menargetkan kelompok miskin dan rentan. Pendekatan berbasis *growth with equity* menjadi penting agar pertumbuhan ekonomi dapat benar-benar menurunkan kemiskinan secara berkelanjutan.

Selain itu, analisis dekomposisi terbukti efektif dalam mengidentifikasi sumber perubahan kemiskinan secara lebih presisi, baik yang berasal dari efek pertumbuhan maupun redistribusi. Temuan ini memberikan dasar empiris bagi perumusan kebijakan penanggulangan kemiskinan yang lebih kontekstual dan berbasis bukti (*evidence-based policy*), sekaligus menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan daerah harus diukur tidak hanya dari kecepatan pertumbuhan ekonomi, tetapi juga dari sejauh mana hasil pertumbuhan tersebut mampu mengurangi ketimpangan dan meningkatkan kesejahteraan seluruh lapisan masyarakat.

Daftar Pustaka

- Araar, A., & Duclos, J. Y. (2022). User manual DASP version 3.03. *DASP: distributive analysis stata package, Université Laval, PEP, CIRPÉE and World Bank*.
- Bourguignon, F. (2003). The growth elasticity of poverty reduction: Explaining heterogeneity across countries and time periods. In T. Eicher & S. Turnovsky (Eds.), *Inequality and Growth: Theory and Policy Implications* (pp. 3–26). MIT Press.
- Datt, G., & Ravallion, M. (1992). Growth and redistribution components of changes in poverty measures: A decomposition with applications to Brazil and India in the

- 1980s. *Journal of development economics*, 38(2), 275-295. [https://doi.org/10.1016/0304-3878\(92\)90001-P](https://doi.org/10.1016/0304-3878(92)90001-P).
- Duclos, J. Y., & Araar, A. (2006). *Poverty and Equity: Measurement, Policy and Estimation with DAD*. Springer US.
- Fan, Z., & Zou, W. (2023). A three-component decomposition of the change in relative poverty: an application to China. *Land*, 12(1), 205. <https://doi.org/10.3390/land12010205>
- Foster, J., Greer, J., & Thorbecke, E. (2010). The Foster–Greer–Thorbecke (FGT) poverty measures: Twenty-five years later. *Journal of Economic Inequality*, 8(4), 491–524. <https://doi.org/10.1007/s10888-010-9136-1>
- Kakwani, N., & Pernia, E. M. (2000). What is pro-poor growth? *Asian Development Review*, 18(1), 1–16. <https://doi.org/10.1142/S0116110500000026>
- Kakwani, N., Son, H. H., Qureshi, S. K., & Arif, G. M. (2003). Pro-poor Growth: Concepts and Measurement with Country Case Studies [with Comments]. *The Pakistan Development Review*, 42(4), 417–444. <http://www.jstor.org/stable/41260555>
- Luo, C. (2022). Economic growth, inequality, and poverty reduction in rural China: Evidence from 2007–2018. *China Economic Journal*, 15(2), 142–166. <https://doi.org/10.1111/cwe.12413>
- Mwabu, G. (2023). Poverty reduction through growth, redistribution and social inclusion in times of COVID-19: Kenyan evidence on the underlying mechanisms. *Journal of African Economies*, 32(Supplement_2), ii69-ii80. <https://doi.org/10.1093/jae/ejac042>
- Nkoro, E. N. E., & Uko, A. K. U. A. K. (2025). Inclusive Growth: The Relationship Between Economic Growth And Poverty Reduction In Subsahara Africa. *ADSU International Journal of Applied Economics, Finance and Management*, 10(3).
- Nugraha, P., & Widyasthika, H. F. (2017). When growth is inclusive in Indonesia? *Jurnal Perencanaan Pembangunan: The Indonesian Journal of Development Planning*, 1(3), 195–209. <https://doi.org/10.36574/jpp.v1i3.19>
- Ravallion, M., & Datt, G. (1992). Growth and redistribution components of changes in poverty measures: A decomposition with applications to Brazil and India in the 1980s. *Journal of Development Economics*, 38(2), 275–295. [https://doi.org/10.1016/0304-3878\(92\)90001-F](https://doi.org/10.1016/0304-3878(92)90001-F)
- Sumarto, S. (2013). Poverty-Growth-Inequality Triangle: The Case of Indonesia. *MPRA Paper 57135*. Retrieved from <https://mpra.ub.uni-muenchen.de/57135/>
- Syam, A. R. P. (2022). Application of the Poverty Equivalent Growth Rate (PEGR) Method (Case Study: Household Income Group in South Sulawesi 2016-2018). *Eigen Mathematics Journal*, 5(1), 1-6. <https://doi.org/10.29303/emj.v5i1.125>
- Zhao, R., & Zhang, Q. (2023). Urban–rural poverty reduction in China: The role of inclusive growth and redistribution. *Social Indicators Research*, 167(3), 1025–1048. <https://doi.org/10.1007/s11205-023-03112-8>